

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pada Bab II Pasal 4 disebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan utama untuk mendorong peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, diperlukan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis pada masyarakat (Resnawaty, 2016). Salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang berbasis pada masyarakat adalah desa wisata. Desa wisata dapat mengedepankan pemberdayaan masyarakat desa, untuk mendukung tujuan dari kepariwisataan (Sidiq & Resnawaty, 2017)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya, penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa pengelolaan kawasan wisata skala desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Dengan demikian, desa wisata berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya lokal untuk mendukung

kesejahteraan serta kemandirian ekonomi desa (Sigalingging, Darlin, & Leiwakabessy, 2023). Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat menjadi strategi yang efektif dalam mendorong partisipasi aktif warga dalam pengelolaan pariwisata dan pembangunan ekonomi desa (Anwar, dkk., 2023)

Desa wisata merupakan bentuk pariwisata yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat serta prinsip keberlanjutan (Dewi, dkk., 2013). Beeton (2006) dalam Sanjaya (2018), menyatakan bahwa pariwisata berbasis masyarakat merupakan upaya pengembangan sektor pariwisata yang melibatkan dan memberdayakan penduduk lokal dengan tujuan melestarikan budaya, tradisi, serta kearifan lokal di suatu daerah. Dalam perkembangannya, desa wisata tidak hanya menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, tetapi juga menawarkan pengalaman wisata yang unik dengan mengedepankan keunikan budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik utama (Komariah, dkk., 2018). Desa wisata yang dikelola dengan baik, mampu dikembangkan secara optimal, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga keberlanjutan sosial, budaya, dan ekonomi desa (Udayani, 2024). Namun, dalam implementasi pengelolaan desa wisata masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat perkembangannya.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Kampung Lawas Maspati adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan fasilitas umum, seperti toilet dan penginapan. Kondisi ini mencerminkan keterlibatan masyarakat yang belum optimal dalam pengembangan desa wisata (Rahmanto & Rohmadiani, 2020). Permasalahan serupa juga ditemukan pada desa wisata lain, seperti Wisata

Romokalisari. Permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pengembangan wisata disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, lemahnya motivasi, serta minimnya pemahaman tentang manfaat ekonomi dan sosial dari keberadaan desa wisata (Dayanti, 2024). Menurut Priambodo (2022) pengembangan desa wisata memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Namun, kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dapat menyebabkan program pengembangan tidak berjalan optimal. Permasalahan dalam beberapa pengelolaan desa wisata, diperlukan pendekatan manajemen yang lebih sistematis dan terstruktur guna memastikan pengelolaan desa wisata berjalan efektif.

Manajemen yang efektif menjadi kunci utama dalam pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat (Puspantari, 2022). Menurut Terry dalam Wijayanti & Wicaksana (2023), manajemen mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*), yang dikenal dengan konsep POAC. Penerapan manajemen POAC memiliki beberapa hambatan jika penerapan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana. Contohnya, pada analisa manajemen POAC di Desa Wisata Mas, Ubud timbul hambatan karena perpindahan tangan antara kepemilikan usaha milik masyarakat menjadi milik investor asing, hal ini memberi dampak pada masyarakat yang harus mengikuti arahan investor asing dalam mengelola wisata (Jannah & Suryasih, 2019).

Analisis POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) pada desa wisata lain yang memiliki kendala tersebut menjadi alasan penulis dalam melakukan penelitian pada pengelolaan desa wisata untuk dapat mencapai tujuan dari perencanaan

pengurus desa wisata. Tujuan utama dari analisa POAC yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan suatu organisasi, Dakhi (2016). Penerapan manajemen POAC pada pengelolaan desa wisata juga dapat dilakukan pada desa wisata lain yang mengedepankan partisipasi masyarakat dan pelestarian budaya lokal. Salah satu contohnya adalah Kampung Lawas Maspati di Kota Surabaya, yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata dalam menciptakan daya tarik unik berbasis sejarah dan kearifan lokal.

Kampung Lawas Maspati memiliki keunikan pada daya tarik wisata sejarah dan budaya yang berbasis kearifan lokal, memberikan pengalaman khas kampung tempo dulu di tengah kota metropolitan. Pada laman [jadesta.kemenparekraf.go.id](http://jadesta.kemenparekraf.go.id), menjelaskan bahwa Kampung Lawas Maspati menyimpan sejarah panjang yang dimulai dari kawasan bangunan pada era Kerajaan Mataram, bekas kediaman Raden Soemomihardjo dari Keraton Surakarta, Sekolah Ongko Loro dari masa kolonial Belanda, dan Losmen “Asri” yang merupakan bekas pabrik roti milik Haji Iskak dan berfungsi juga sebagai dapur umum saat pertempuran 10 November 1945 (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2025).

Meskipun Kampung Lawas Maspati memiliki keunikan dari segi daya tarik wisata yang ditawarkan, kampung ini masih menghadapi tantangan dalam aspek pengelolaannya. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah kesulitan dalam mengkoordinasikan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan wisata. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menyangkut aspek pemahaman mengenai pembagian upah atau keuntungan dari

kegiatan wisata yang kerap kali belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh warga. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengelolaan Kampung Lawas Maspati belum sepenuhnya menerapkan fungsi manajemen yang optimal. Hal ini dapat menjadi indikasi dari kelemahan dalam koordinasi internal, ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) dalam pembagian hasil kegiatan wisata, keterbatasan sumber daya dalam membangun komunikasi efektif, serta minimnya pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi. Namun, dugaan terhadap permasalahan tersebut belum didasarkan pada temuan penelitian empiris, sehingga masih memerlukan analisis mendalam. Oleh karena itu, diperlukan analisis menyeluruh terhadap penerapan fungsi manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) guna mengidentifikasi permasalahan lain, menemukan faktor penyebab yang mendasarinya, serta memberikan rekomendasi untuk mendukung optimalisasi pengelolaan desa wisata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk menganalisis penerapan manajemen POAC khususnya pada pengelolaan di Kampung Lawas Maspati. Analisis dilakukan untuk memahami penerapan manajemen POAC pada pengelolaan desa wisata dan bagaimana pengelolaan dapat dilakukan untuk menunjang pengembangan wisata. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan desa wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena pengelolaan desa wisata berdasarkan persepsi dan pendalaman subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2019), metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data secara mendalam dengan menekankan makna dibalik suatu fenomena sosial.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) dalam pengelolaan Kampung Lawas Maspati sebagai desa wisata. Kajian ini mencakup analisis manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang diterapkan dalam mengelola desa wisata berbasis masyarakat guna mendukung pengembangan serta optimalisasi pengelolaan Kampung Lawas Maspati. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wisata Kampung Lawas Maspati.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Menganalisis penerapan manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) dalam pengelolaan Desa Wisata Kampung Lawas Maspati untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan desa wisata.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Menganalisis penerapan manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) dalam pengembangan wisata Kampung Lawas Maspati
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Kampung Lawas Maspati.

3. Memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pengelolaan Kampung Lawas Maspati.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan manajemen, khususnya dalam bidang manajemen desa wisata berbasis masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang penerapan manajemen POAC dalam sektor desa wisata, yang dapat dijadikan referensi bagi akademisi maupun peneliti selanjutnya.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

1. Memberikan rekomendasi bagi pengelola Kampung Lawas Maspati dalam mengoptimalkan pengelolaan desa wisata melalui analisis POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*).
2. Menjadi panduan bagi komunitas atau pengelola desa wisata lainnya dalam penerapan manajemen untuk mendukung pengembangan wisata.
3. Menyediakan referensi akademik dalam pengembangan kurikulum serta menjadi bahan studi bagi mahasiswa dan akademisi.